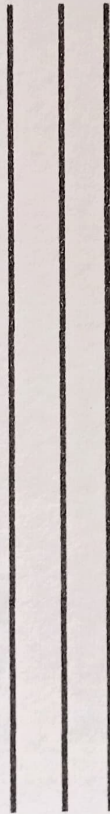




**PERATURAN KALURAHAN GADING
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN GADING
KAPANEWON PLAYEN**



LURAH GADING
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GADING
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GADING,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Desa Gading Nomor 3 Tahun 2022 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027(Lembaran Desa Gading Tahun 2022 Nomor 3)
27. Peraturan Kalurahan Gading Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7);
 28. Peraturan Kalurahan Gading Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024(Lembaran Kalurahan Gading Tahun 2023 Nomor 5);
 29. Peraturan Kalurahan Gading Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gading Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING
dan
LURAH GADING
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.382.960.600,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.541.536.394,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 158.575.794,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 163.575.794,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 158.575.794,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

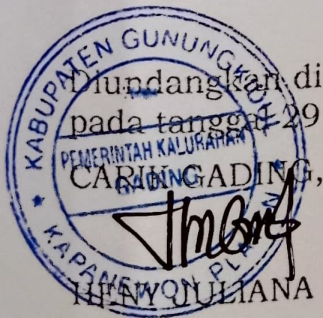
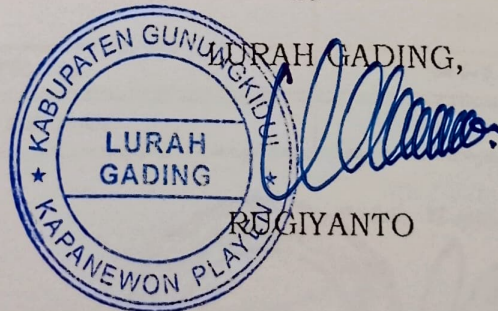
Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gading.

Ditetapkan di Gading

pada tanggal 29 Desember 2023



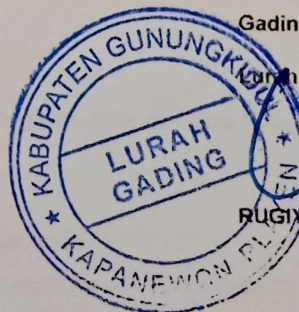
LEMBARAN KALURAHAN GADING TAHUN 2023 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GADING
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.299.960.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.382.960.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	775.579.348,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	808.286.916,00	
5.3.	Belanja Modal	877.205.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.464.330,00	
	JUMLAH BELANJA	2.541.536.394,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(158.575.794,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	163.575.794,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	163.575.794,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	158.575.794,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gading, 17 January 2024



RUGIXANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GADING
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.299.960.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.382.960.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.281.376.264,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	944.862.864,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	625.030.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	625.030.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.701.568,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.701.568,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	95.618.676,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.618.676,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.160.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.854.840,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.854.840,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.650.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.650.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	214.778.400,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	175.028.400,00	ADD, DDS, PAD,
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.028.400,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	13.150.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.150.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	20.000.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3	Belanja Modal	20.000.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	2.000.000,00	ADD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.600.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.050.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	5.750.000,00	DDS, PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	101.735.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	9.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	9.300.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.825.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.825.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)	4.275.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.275.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.872.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.872.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.925.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	37.613.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.613.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.400.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	2.525.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	18.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.200.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.200.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	745.545.800,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	281.347.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	247.347.400,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	247.347.400,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	111.415.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.775.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	40.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291.533.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	193.794.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	193.794.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	35.369.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	35.369.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	62.370.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	62.370.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	59.250.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.250.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.250.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	8.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	200.425.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.300.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	2.050.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.250.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	8.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	20.000.000,00	PAD, PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	152.200.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	149.950.000,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	149.950.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.250.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.925.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.650.000,00	PAD, PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.545.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.545.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.250.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.480.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>233.725.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185.225.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	106.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	76.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	79.225.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	79.225.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.320.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.320.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.680.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	8.500.000,00	ADD
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>80.464.330,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.464.330,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.464.330,00	PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.464.330,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.541.536.394,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(158.575.794,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	163.575.794,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	158.575.794,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gading, 17 January 2024

Lurah

LURAH GADING

RUGHYANTO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN GADING

ꦥꦶꦭꦏꦏꦸꦫꦲꦁꦒꦢꦶꦁ

Alamat : Gading IV, Gading, Playen, Gunungkidul Kode Pos 55861

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADING
DAN
LURAH GADING**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GADING
TAHUN 2024**

NOMOR 09 TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Gading Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama dengan Pemerintah Kalurahan Gading, menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gading tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gading Tahun 2024.

Naskah Peraturan Kalurahhan sebagaimana terlampir.

Demikianlah Persetujuan Bersama ini dibuat di Gading dan ditandatangani bersama Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Gading.

KETUA BAMUSKAL



WASTOYO, ST







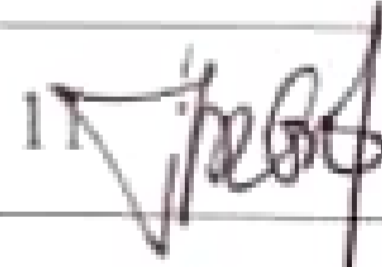




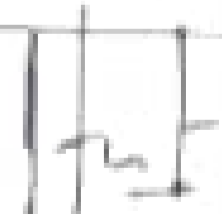

LURAH GADING



RUGIYANTO

DAFTAR HADIR
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

AGENDA
 PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN GADING
 NOMOR TAHUN 2023
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	WASTOYO, ST	Ketua	
2	SUJOKO, APtnh, SH, MH	Wakil Ketua	2
3	TUGIMIN, S.Pd	Sekretaris	3
4	Ag. AGUS SUGIYANTA, SE.	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	
5	SUWASONO	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	5
6	YUSUF SUHENDRI	Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Masyarakat	
7	AL. SUPARDI	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7 
8	CHRISTINA YATINI	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	8 
9	SUBIYANTO	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	9
10	RUGIYANTO	Lurah	10 
11	HENY JULIANA SARI	Carik	11 
12	EXSAN TRIYONO	Jagabaya	12 
13	TRI PRASETYO Y.	Ulu-ulu	13 
14	A.M GOZALI	Kamitua	14 
15	MARIA ASTIKA G.	Tata Laksana	15 
16	K. PURWOHARTONO	Danarta	16 
17	EPI KUNTARYATI	Pangripta	17 

KETUA BAMUSKAL

LURAH GADING



WASTOYO, ST



RUGIYANTO